

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pendidikan merupakan wahana strategik bagi usaha meningkatkan mutu kehidupan manusia, yang ditandai dengan membaiknya derajat kesejahteraan, menurunnya kemiskinan, dan terbukanya berbagai pilihan dan kesempatan mengembangkan diri di masa depan. Dengan demikian, secara umum pendidikan mempunyai peranan yang sangat sentral dalam mendorong individu dan masyarakat, untuk mencapai kemajuan pada semua aspek kehidupan.

Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun pendidikan juga menjadi barometer tingkat kemajuan bangsa yang bersangkutan. Hal ini patut dicermati mengingat pembangunan pendidikan di Indonesia relatif masih tertinggal di banding negara-negara lain, bahkan di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Keteringgalan pembangunan pendidikan Indonesia itu tercermin dalam *Human Development Index Report (1999)*, yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-105, urutan ini jauh dibawah Singapura dan Brunei Darussalam, masing-masing pada posisi ke-22 dan ke-25; sementara Malaysia (56), Thailand (67), dan Philipina (77), bahkan Srilangka saja pada posisi ke (90). Selain aspek pendidikan, indikator dalam menentukan indeks pembangunan manusia dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial (ekonomi).

Masalah pendidikan menjadi kian penting dan strategik karena dapat dijadikan fundamen sosial guna mendorong proses transformasi masyarakat. Pendidikan berkaitan langsung dengan isu-isu krusial seperti kemiskinan, kesejahteraan, kesehatan, kelompok sosial, dan demokrasi. Dalam perspektif demikian, pendidikan

berdimensi ganda: secara ekonomi dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan. Sedangkan secara sosial, pendidikan menjadi jalan untuk memperkuat kelompok masyarakat dan membuka wawasan demokrasi. Jadi pendidikan merupakan mata rantai yang menghubungkan dengan sejumlah persoalan sosial ekonomi seperti terlihat pada *gambar 1.1*.

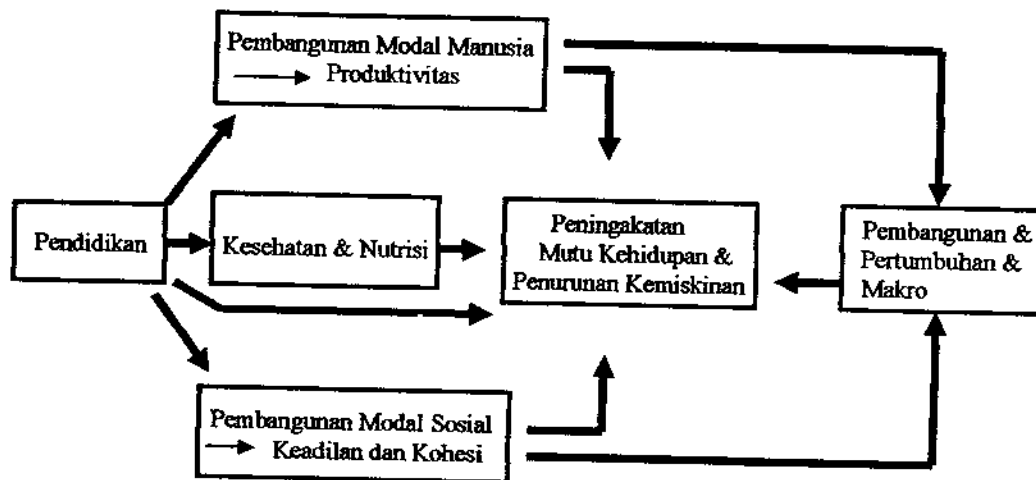
Berdasarkan gambar tersebut, tampak betapa besar arti penting dan strategik pendidikan. Beberapa argumen dapat dikemukakan untuk mendukung pandangan ini.

Pertama, pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan seseorang, sehingga ia menjadi lebih produktif dan karena itu dapat meningkatkan penghasilan secara memadai untuk kemudian mendorong peningkatan pendapatan. Dalam pengertian ini pendidikan merupakan bentuk investasi di bidang SDM (*Human Capital Development*).

Kedua, sejalan dengan peningkatan penghasilan dan perbaikan kesejahteraan, maka akan berpengaruh pula terhadap peningkatan derajat kesehatan dan gizi (nutrisi).

Ketiga, meningkatkan mutu dan standar hidup, sebab pendidikan membuat individu dan masyarakat lebih terpelajar sehingga secara sosial menjadi lebih kuat.

Keempat, mendorong proses pembangunan sosial melalui penguatan kohesi dalam masyarakat, membuka berbagai peluang dan kesempatan yang lebih baik. Pendidikan yang bertemali dengan ekonomi dan sosial akan mendorong akselerasi pembangunan dan pertumbuhan secara makro.



Gambar 1.1. Arti Penting dan Strategi Pendidikan
 Sumber: *Education Sector Strategy, The World Bank, 2000*

Membangun pendidikan bermutu harus dipandang sebagai suatu sistem yang yang dinamik. Menurut studi Bank Dunia (1999) ada tiga pilar utama yang menopang sistem pendidikan yang baik, (i) akses, (ii) kualitas, dan (iii) dukungan seperti terlihat pada *gambar 1.2*.

Berkaitan dengan aksesibilitas mengandaikan terbukanya kesempatan bagi tiap orang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Masalah akses mencakup tiga hal: (1) kesiapan mahasiswa untuk belajar di Perguruan Tinggi yang mensyaratkan (i) terpenuhinya gizi, tingkat kesehatan yang baik, dan tersedianya gedung tempat belajar yang cukup, (ii) adanya dukungan orang tua dan keluarga, (iii) lingkungan belajar yang mendukung (konduif); (2) lingkungan pembelajaran di Perguruan Tinggi yang mensyaratkan (i) kepemimpinan Perguruan Tinggi yang memahami masalah pendidikan, (ii) kejelasan tujuan dan harapan pelaksanaan pendidikan, (iii) terbukanya peluang untuk memperoleh fasilitas; dan (3) kesempatan dan peluang bagi semua pihak yang mensyaratkan (i) adanya pemerataan pada semua jenjang pendidikan, (ii) diberikannya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu (secara ekonomi) dan

mahasiswa penyandang cacat (disable), (iii) tersedianya sumber-sumber pembelajaran: peralatan dan buku pelajaran secara memadai.

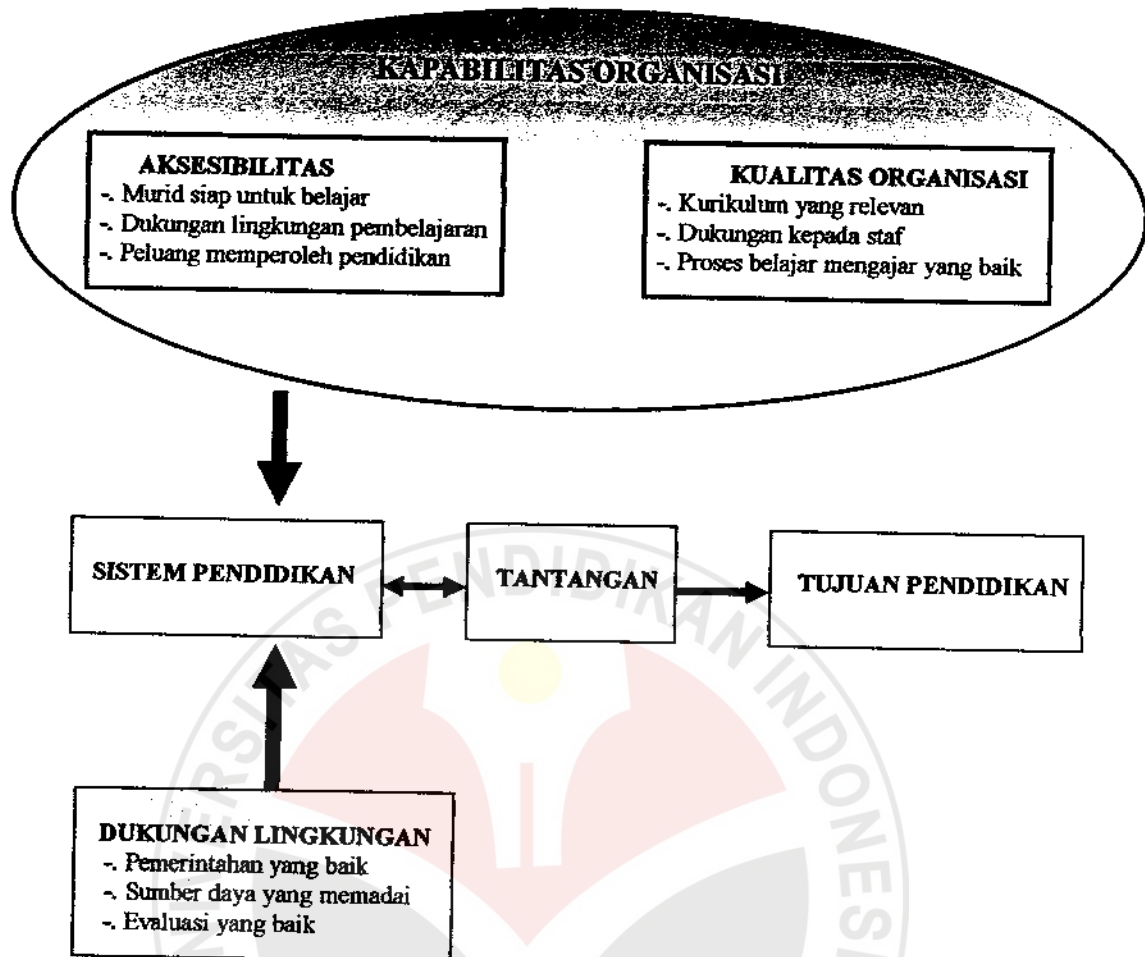
Adapun kualitas organisasi berhubungan dengan tiga hal: (1) kurikulum yang relevan yang mensyaratkan (i) memenuhi sejumlah kompetensi guna menjawab tuntutan dan tantangan arus globalisasi, (ii) berkontribusi pada pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat, dan (iii) bersifat lentur dan adaptif terhadap perubahan; (2) dukungan kepada staf yang ditandai (i) memberi pelatihan menurut bidang studi dengan melakukan pembaruan secara reguler, (ii) memberi gaji memadai dan membuka pengembangan karier profesional; dan (3) proses belajar mengajar yang ditandai (i) tercapainya materi yang menjadi sasaran pembelajaran, (ii) materi yang diberikan relevan dengan kebutuhan di masyarakat, (iii) berorientasi pada hasil dan *out-put*, (iv) monitoring dengan kualitas yang terjaga secara ketat dan terjamin dengan baik.

Mengenai dukungan lingkungan berkaitan dengan tiga hal. (1) pemerintahan yang baik yang mensyaratkan (i) kejelasan tanggung jawab dan pertanggungjawaban, (ii) adanya analisis kebijakan dan kapasitas perencanaan, (iii) desentralisasi pengambilan keputusan; (2) tersedianya sumber daya yang meliputi (i) pengaturan dan pengelolaan atas kontribusi / partisipasi swasta, (ii) pengaturan alokasi dana publik, (iii) kontrol terhadap penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan (3) sistem evaluasi yang mensyaratkan (i) adanya sistem informasi yang baik, (ii) monitoring dan umpan balik guna meningkatkan kualitas pendidikan di masa datang.

Pendidikan merupakan persoalan strategik bagi sebuah bangsa. Pendidikan bukan saja penting bagi upaya melahirkan individu dan masyarakat yang terpelajar; tetapi juga membangun generasi baru yang siap menghadapi tantangan masa depan.

Selain itu, bahwa tujuan strategi adalah untuk menetapkan suatu rencana agar suatu perguruan tinggi dapat mencapai suatu posisi yang memberikan kepadanya suatu tempat yang khusus diantara berbagai perguruan tinggi lainnya (Dolence and Norris, 1995) yang ada dalam wilayah suatu negara. Premis ini telah digunakan dalam mengembangkan suatu strategi di Southampton College of Long Island University in Southampton, New York, tetapi Brown (1998) menyatakan bahwa didalam proses strategi University of North Carolina di Asheville, dimana setiap perguruan tinggi ditantang untuk mengidentifikasi dan memupuk *perbedaan kemampuan dalam memperoleh pasarnya sendiri*. Dengan demikian hal ini tentu akan menentukan cekungan mana yang akan menimbulkan rasa terbaik bagi suatu perguruan tinggi tertentu dalam mengembangkan dan mengeksploitasi fokus strategiknya secara baik. Baur dari berbagai lembaga pendidikan tinggi yang ada sekarang ini belum memberi suatu profil yang dapat disebut unik. Struktur dasar dari pendidikan tinggi, khususnya ditingkat sarjana agak duplikasi, sementara spesialisasi terutama di tingkat pasca sarjana menawarkan beberapa diferensiasi.

Pendidikan juga menjadi bekal utama sebagai persiapan memasuki kompetisi global, sebuah persaingan antar bangsa yang demikian ketat dan berpengaruh terhadap semua dimensi kehidupan: ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pada akhirnya pendidikan juga akan menentukan kualitas sebuah bangsa, serta berpengaruh signifikan dalam mendorong proses transformasi sosial menuju kehidupan yang maju, modern dan bermartabat. Benar ungkapan yang dikutip di atas: *"Give people a handout or a tool, and they will live a little better. Give them an education, and they will change the world (sumber: Education Sector Strategy, The World Bank, 2000)*.



Gambar 1.2. Tiga Pilar Sistem Pendidikan yang Baik

Sumber: *Education Sector Strategy, The World Bank, 2000*

Disamping itu pula bahwa pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting dan besar artinya bagi bangsa yang sedang membangun. Pembangunan fisik tanpa diikuti dengan pembangunan manusianya akan menjadi sia-sia, demikian pula sebaliknya. Kedua jenis pembangunan ini harus dilaksanakan secara serentak. Jika pembangunan fisik ditujukan untuk menciptakan sarana kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap warga negara, maka pendidikan ditujukan untuk

menciptakan manusia-manusia pembangunan yang bertanggung jawab dan sadar akan hak-hak serta kewajibannya terhadap kelangsungan hidup bangsanya.

Wawasan dan keyakinan bahwa pendidikan tinggi harus dikembangkan ke arah suatu sistem untuk kepentingan nasional, maka perlu merumuskan serangkaian kebijakan mengenai pengembangan pendidikan tinggi tersebut. Adapun ihwal tujuan pengembangan, peran dan fungsi pendidikan tinggi, dasar dan arah pembinaan serta pengembangannya, langkah pembinaan, kelembagaan pendidikan tinggi dan pembiayaan serta pembiayaan dan alokasi anggaran.

Dikemukakan bahwa pendidikan tinggi harus menjadi daya gerak yang dinamis bagi proses modernisasi, yang dapat menghubungkan keadaan sekarang dan masa depan, dan mengusahakan penemuan arah modernisasi menuju pembangunan masyarakat masa depan. Pengembangan sistem pendidikan kepada penegakan suatu sistem pendidikan tinggi di Indonesia secara menyeluruh yang meliputi perguruan tinggi negeri dan swasta, di dalam suatu pola pembinaan dengan arah berikut:

1. Merupakan bagian integral dari usaha pembangunan nasional maupun daerah;
2. Merupakan penghubung antara dunia ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat;
3. Melaksanakan pendidikan berdasarkan pola pemikiran yang analitik dan berorientasi pada pemecahan permasalahan dengan pandangan masa depan;
4. Berpartisipasi dalam perbaikan serta pengembangan mutu kehidupan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan penerapannya, pengertian dan kerjasama internasional dalam usaha mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan umat manusia; dan



5. Memungkinkan terlaksananya pengembangan seluruh kemampuan kepribadian manusia, mobilitas dalam memperoleh pengalaman pendidikan diversifikasi dan demokratisasi dalam pendidikan dan proses belajar, mobilisasi sumber masyarakat untuk pendidikan, pertumbuhan kegairahan research.

Arah pengembangan pendidikan tinggi diatas meliputi pembinaan perguruan tinggi secara komprehensif serta berbagai kebijakan yang berlingkup luas. Dengan demikian landasan kebijakan pengembangan diatas telah membuka jalan bagi penyusunan pengembangan jangka panjang pendidikan tinggi yang konseksional, berjangka panjang, dengan pendekatan stratejik, yang berkait dan berkesepadanan dengan pembangunan nasional.

Pengembangan sistem pendidikan tinggi yang menjadi pokok penanganan meliputi pembangunan infrastruktur pendidikan tinggi:

1. Pengorganisasian peran dengan membentuk lembaga agar sistem pendidikan tinggi dapat berperilaku efektif dalam menjalankan perannya; berupa:
 - a. Stratifikasi pendidikan dalam tiga strata dan dua jalur
 - b. Pola ilmiah pokok dalam pengembangan keilmuan
 - c. Sistem tunggal pendidikan tinggi yang meliputi perguruan tinggi negeri dan swasta
2. Pengorganisasian fungsi sistemik dengan menata dan menyusun pranata agar sistem dapat menyelenggarakan fungsi dengan efektif; berupa:
 - a. Penataan fakultas, pembentukan lembaga dan unit teknis
 - b. Penataan program studi, acara dan penyelenggaraan pengajaran, serta kriteria keberhasilan studi

- c. Penataan sistem penilaian untuk kenaikan pangkat dalam jabatan akademik
 - d. Peningkatan kualifikasi tenaga akademik untuk menghasilkan lulusan yang bermutu
 - e. Peningkatan kemampuan tenaga akademik dalam penelitian
 - f. Pengadaan sumber daya pendidikan tinggi
 - g. Pendirian pusat antar universitas untuk menghasilkan lulusan tingkat sarjana yang baik
3. Pengorganisasian penerahan sumber daya agar kegiatan dapat diselenggarakan secara efisien berupa:
- a. Penetapan beban kerja dosen
 - b. Pemanfaatan optimal sumber daya pendidikan untuk meningkatkan kapasitas tampung
 - c. Penggunaan fasilitas secara bersama

Adapun mengenai pendidikan Strata-1 dan Diploma dibawah ini di tahun-tahun akhir Pelita V diperlihatkan pada tabel 1.1 dibawah ini sebaran mahasiswa dalam berbagai kategori perguruan tinggi. Jumlah seluruhnya 2,2 juta. Dengan demikian dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia 19 sampai dengan 24 tahun sebesar 22,78 juta, maka, Angka Partisipasi Kasar untuk pendidikan tinggi besarnya 10%



Tabel 1.1
Sebaran Mahasiswa Pada Akhir Pelita V
(Dalam Ribu)

Jumlah penduduk kelompok usia 19-24 tahun	22.780
Jumlah mahasiswa	2.200
Angka partisipasi kasar	10,0%
Terdiri atas:	
Mahasiswa PTN	500
Mahasiswa PTS	1.365
Mahasiswa PTA	216
Mahasiswa PT Dinas	114
Perbandingan jumlah:	
Mahasiswa PTN:PTS	1:2,5
Perbandingan mahasiswa PTN:	
Teknik / teknologi	14%
Eksakta lain	19%
Ilmu sosial dan pendidikan	67%

Hampir 70% mahasiswa PTN mengikuti program di kelompok bidang ilmu sosial dan pendidikan. Hal itu berlaku pula bagi mahasiswa PTS, seperti terlihat dalam tabel 1.2.

Tabel 1.2
Sebaran Mahasiswa Terdaftar
Menurut Kelompok Bidang Studi
Tahun 1994
(Dalam Persen)

Kelompok Bidang	PTN	PTS
Teknologi	14	16
Sains	19	10
Sosial dan Pendidikan	67	74
Total	100	100

Perbedaan yang besar terdapat antara nisbah dosen tetap terhadap mahasiswa untuk PTN dibandingkan dengan PTS. Bilamana nisbah untuk PTN dapat dikatakan memadai, maka tidaklah demikian halnya dengan PTS. Perbedaan nisbah itu menunjukkan bahwa secara rata-rata PTS lebih banyak menggunakan tenaga pengajar tidak tetap dalam penyelenggaraan pendidikannya seperti terlihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Nisbah Dosen Tetap Terhadap Mahasiswa
Di PTN Dan PTS
Tahun 1994

Bidang	PTN	PTS
Teknologi	1 : 10	1 : 26
Sains dan IPA	1 : 6	1 : 21
Sosial dan Pendidikan	1 : 11	1 : 35

Ketentuan terpenting bagi pengembangan pendidikan tinggi adalah sasaran Angka Partisipasi Kasar untuk PJP II yang dikutip dalam Tabel 1.4 di bawah

Tabel 1.4
Sasaran Angka Partisipasi Kasar
Pendidikan Tinggi Dalam PJP II
(Dalam Persen)

	Akhir Pelita					
	5	6	7	8	9	10
APK	10,5	12,8	15,0	19,0	21,0	25,0

Suatu proyeksi telah dibuat mengenai populasi mahasiswa pada tahun 2000, 2005, dan 2020, dengan menggunakan APK pendidikan tinggi yang tercantum dalam tabel 1.5. Dalam menghitung populasi mahasiswa untuk setiap tahun bersangkutan telah dipergunakan proyeksi populasi kelompok usia 19-24 tahun yang diterbitkan oleh Lembaga Demografi-UI.

Hasil perhitungannya dicantumkan dalam tabel 1.5.

Tabel 1.5
Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi
Menurut GBHN 1993
Dan Simulasi Pertumbuhan Mahasiswa

	1995	2000	2005	2020
APK Pend. Tinggi*	10 %	12,8 %	15 %	25 %
Pend. Usia 19-24	22,78 juta	25,65 juta	26,98 juta	24,79 juta
Mahasiswa Total	2,20 juta	3,10 juta	4,05 juta	6,20 juta
Mahasiswa PTN	0,50 juta	0,55 juta	0,69 juta	1,20 juta
MahasiswaPTS	1,37 juta	2,20 juta	3,00 juta	4,64 juta
Mahasiswa PTA/PTD	0,35 juta	0,35 juta	0,36 juta	0,40 juta
PTN dan PTS:				
Mahasiswa Teknologi	16 %	18 %	20 %	24 %
Mahasiswa Eks. Lain	12 %	12 %	13 %	14 %
Mahasiswa Sos./Pend.	72 %	70 %	67 %	62 %
PTN saja:				
Mahasiswa Teknologi	14 %	24 %	31 %	42 %
Mahasiswa Eks. Lain	19 %	17 %	18 %	23 %
Mahasiswa Sos./Pend.	67 %	59 %	51 %	35 %
PTN Tekn. Saja				
Mahasiswa S-1	47 Ribu	70 ribu	90 ribu	133 ribu
Mahasiswa Diploma	23 Ribu	70 ribu	125 ribu	284 ribu

Catatan: * Sasaran PJP-II
 + Proyeksi Lembaga Demografi-UI

Dalam tabel 1.5 dicantumkan juga suatu hasil simulasi tentang bagaimana proporsi mahasiswa PTN yang mempelajari bidang teknologi, eksakta lain, dan ilmu sosial pendidikan, berkembang dengan waktu, apabila dapat dilakukan perubahan proporsi mahasiswa teknologi dari 16% pada tahun 1995 menjadi 42% pada tahun 2020, proporsi mahasiswa eksakta lain dari 19% pada tahun 1995 menjadi 23% pada tahun 2020, serta proporsi mahasiswa ilmu sosial dari 67% pada tahun 1995 menjadi 35% pada tahun 2020.

Suatu telaah mengenai besarnya biaya yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas perguruan tinggi negeri agar dapat menampung perkembangan populasi mahasiswa seperti terlihat dalam tabel 1.5, serta perkiraan tentang dana dalam dan luar negeri yang diperkirakan dapat diperoleh di masa depan, menunjukkan bahwa untuk merealisasikannya perlu upaya khusus dalam memobilisasi dana.

Peningkatan populasi mahasiswa bidang teknologi dan eksakta lain secara proporsional terhadap populasi mahasiswa ilmu sosial dan pendidikan sungguh relevan terhadap tuntutan kebutuhan pembangunan dan perkembangan zaman. Perubahan proporsi populasi ini dapat dilakukan secara bertahap dengan memberi prioritas perluasan pada program-program studi di bidang teknologi dan eksakta lain dibandingkan dengan program studi ilmu sosial dan pendidikan.

Hingga saat ini, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada belum mampu menampung semua lulusan Sekolah Menengah (SLTA), hanya sebagian kecil dari semua lulusan SLTA yang dapat ditampung di PTN. Untuk itu dibutuhkan adanya institusi lain yang dapat membantu PTN dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Institusi yang dimaksud adalah Perguruan Tinggi Swasta.

Perguruan tinggi swasta merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Perguruan tinggi swasta sebagai suatu organisasi, tentunya mempunyai strategi yang berkaitan dengan usaha-usaha menunjang kelancaran kegiatannya serta usaha-usaha pengembangan lebih lanjut.

Setiap strategi yang diambil dipandang sebagai sub-sistem dari sistem lingkungan, dimana dalam pengembangannya tidak akan pernah terlepas dari pengaruh-pengaruh lingkungan. Lingkungan yang dihadapi oleh PTS mempunyai

karakteristik tersendiri dan beberapa elemen lingkungan tersebut mempunyai pengaruh yang dominan terhadap pengelolaan PTS.

Sampai saat ini di Indonesia terdapat 51 perguruan tinggi negeri (PTN) dan lebih dari 1000 perguruan tinggi swasta (PTS). (*Pembangunan Pendidikan dan kebudayaan Menjelang era tinggal landas, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1994*).

Indonesia telah memiliki cukup kemampuan menampung mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta, maka perguruan tinggi swasta (PTS) dituntut untuk berperan serta secara aktif dalam pembangunan, khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan. Dari hasil penelitian The World Bank (*Education in Indonesia: From Crisis to Recovery, 1998*), sekitar 73% dari lulusan SMA yang tidak diterima di PTN memilih untuk memasuki PTS data ini mencerminkan besarnya tuntutan masyarakat terhadap peranan PTS dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sementara itu, sejalan dengan perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, masyarakat semakin kritis dan selektif dalam menilai suatu PTS. Tuntutan terhadap hasil karya (performance) dan pertanggungjawaban (accountability) PTS sebagai anggota masyarakat ilmiah semakin meningkat. Hal ini makin diperkuat lagi dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga setiap PTS dituntut untuk melakukan perencanaan seluruh kegiatan dan pengembangannya secara lebih baik dan realistis.

Persoalan (issue) yang dihadapi PTS dapat dikelompokkan dalam bidang-bidang kelembagaan, akademik dan pembiayaan disamping dampak yang ditimbulkan permasalahan ini. Salah satu issue yang seringkali tidak mencukupi untuk membiayai

pertumbuhan dan pembangunan PTS. Karena keterbatasan dana yang dimiliki, menyebabkan sebagian PTS tidak dapat melaksanakan secara baik pengembangan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan lainnya.

Sumber dana yang utama bagi sebagian besar PTS adalah uang sumbangan dan iuran dari mahasiswa. Karena itu untuk memperoleh dana yang lebih besar, PTS seharusnya dapat memperbesar uang iuran ataupun menambah jumlah mahasiswa yang diterima. Sedangkan untuk menarik mahasiswa yang lebih banyak, PTS dihadapkan pada masalah keterbatasan daya tampung. Dengan demikian, dana yang dapat dikumpulkan oleh PTS terbatas juga.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh PTS untuk dapat berkembang adalah sangat minimnya personalia, terutama pemegang jabatan-jabatan struktural. Untuk itu, banyak PTS yang menggunakan dosen-dosen PTN untuk memegang jabatan-jabatan struktural penting. Para dosen PTN ini sesungguhnya terikat oleh pekerjaannya sebagai pegawai negeri, yang tentunya akan mereka perhatikan melebihi tugas-tugas mereka sebagai pejabat PTS. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemampuan PTS untuk mencapai kemajuan-kemajuan yang cukup berarti.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

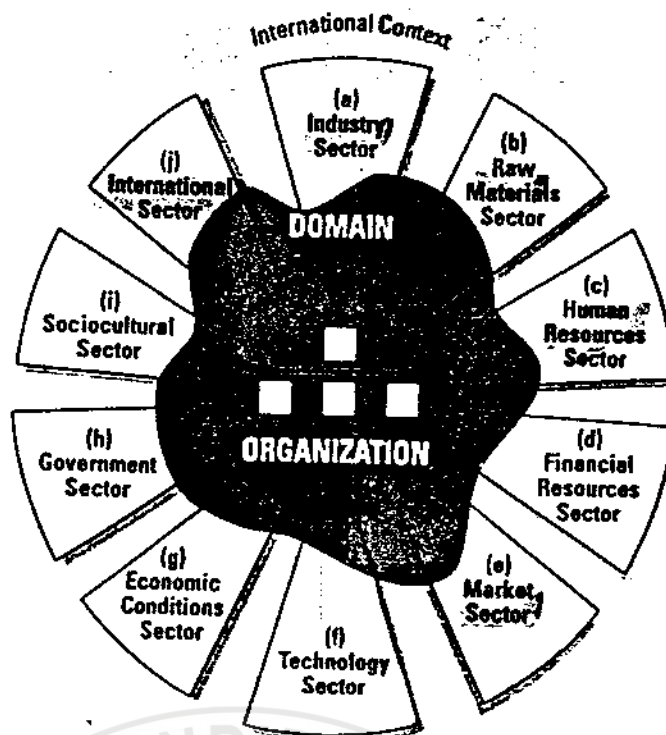
Dalam penyusunan pengembangannya, setiap PTS tidak pernah lepas dari faktor-faktor lingkungannya. Hal ini berlaku bagi semua tingkatan strategi, baik untuk tingkat kebijakan, tingkat bisnis, maupun pengembangan stratejik tingkat operasional. PTS sebagai suatu komponen pendidikan tinggi dapat dipandang sebagai suatu organisasi yang mempunyai lingkungan yang mempengaruhi perkembangan organisasi bersangkutan.

Setiap organisasi memiliki beberapa karakteristik dasar, seperti nilai-nilai, manusia dan sumber-sumber yang sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat organisasi yang terdapat dalam lingkungan masyarakat tersebut dan juga berpengaruh terhadap manajemen serta langkah-langkah strategik yang harus dilakukan oleh organisasi.

Organisasi sosial memiliki batas-batas yang memisahkannya dari lingkungan yang merupakan suprasistemnya. Meskipun demikian, organisasi dapat dikatakan juga sebagai suatu sistem yang terbuka dan batas-batas tadi mempunyai sifat permeabel terhadap berbagai input dan output organisasi lingkungan, dalam hal ini masyarakat, mempunyai sifat dinamis dan selalu berubah menjadi lebih kompleks lagi. Oleh karenanya, untuk dapat mempertahankan atau bahkan dapat meningkatkan kegiatan-kegiatannya, setiap organisasi harus lebih meningkatkan perhatiannya terhadap potensi-potensi lingkungan yang ada.

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap organisasi, merupakan obyek penelitian utama bagi setiap ahli organisasi, karena hal ini sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan management.

Richard L. Daft (2001) menggambarkan *task environment* yang meliputi sektor-sektor dengan interaksi secara langsung yang memberikan dampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Khususnya *task environment* termasuk didalamnya adalah industri bahan-bahan mentah dan sektor-sektor pemasaran dan barangkali sumber daya manusia dan sektor-sektor internasional seperti pada *gambar 1.3*.



Gambar 1.3. Lingkungan Organisasi

Sumber: *Organization Theory and Design Seventh Edition, by Richard L. Daft, 2001*

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di beberapa Perguruan Tinggi, maka masalah-masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap Perguruan Tinggi Swasta.
- b. Perguruan Tinggi Swasta sebagai suatu organisasi, tentunya mempunyai pengembangan strategik yang berkaitan dengan usaha-usaha menunjang kelancaran kegiatan dan juga usaha-usaha pengembangan lebih lanjut.

C. PERUMUSAN MASALAH

Dengan banyaknya faktor yang harus diperhitungkan dalam mengusahakan pertumbuhan dan perubahan Perguruan Tinggi Swasta ke arah kemajuan. Pemecahan terhadap satu masalah saja tidak selalu dapat membawa ke arah kemajuan, sebab

untuk mencapai kemajuan banyak sekali masalah yang saling bersangkutan dan harus dipecahkan. Di samping itu pertumbuhan dan perkembangan ke arah kemajuan Perguruan Tinggi Swasta tidak dapat didasarkan pada perbaikan secara simultan pada beberapa faktor yang strategik. Faktor-faktor ini tidak saja terdiri dari faktor-faktor yang nampak jelas di permukaan, tetapi juga meliputi berbagai faktor yang sering kali justru tak terlihat.

Usaha untuk melakukan perubahan memerlukan diagnosa terhadap apa yang ada sekarang dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang sehingga dapat ditentukan apa yang harus dicapai serta masalah-masalah apa yang dapat menghambat dalam mengadakan perubahan. Berdasarkan diagnosa tersebut selanjutnya dirumuskan strategi-strategi yang berkaitan dengan rencana pengembangan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.

Setiap strategi yang diambil dapat kita pandang sebagai upaya meraih dukungan dari lingkungan, dimana dalam perumusan strategi tidak akan lepas dari pengaruh-pengaruh lingkungan. Tetapi, tentunya lingkungan yang dihadapi oleh Perguruan Tinggi Swasta berbeda dengan lingkungan yang dihadapi oleh organisasi-organisasi lainnya dan tidak semua lingkungan mempunyai pengaruh yang sama terhadap Perguruan Tinggi Swasta. Dengan demikian, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah aspek sumber keuangan dapat membentuk strategi pengembangan PTS.
2. Apakah aspek bahan baku pada organisasi berpengaruh signifikan pada proses transformasi kualitas strategi pengembangan PTS.
3. Apakah aspek saingan pada organisasi berpengaruh positif pada percepatan proses transformasi kualitas strategi pengembangan PTS.

4. Apakah aspek lingkungan sosial budaya pada organisasi berpengaruh signifikan pada strategi pengembangan organisasi.
5. Apakah aspek perundang-undangan pada organisasi PTS berpengaruh terhadap peningkatan strategi pengembangan PTS.
6. Apakah aspek transformasi, sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap strategi pengembangan PTS.
7. Apakah aspek lingkungan sumber daya / teknologi berpengaruh positif terhadap strategi pengembangan PTS.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ditetapkan sebelum kegiatan penelitian dimulai, karena tujuan ini akan menentukan arah atau sasaran yang ingin dicapai dari penelitian. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap rencana pengembangan yang bersifat strategik dari Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Jawa Barat.

Keluaran dari penelitian ini diharapkan dapat membantu para pengambil keputusan pada masing-masing Perguruan Tinggi Swasta untuk menyusun rencana pengembangan strategik yang biasanya dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) dengan lebih baik.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengayaan khasanah penelitian empirik di bidang Perilaku Organisasi dan Ilmu Administrasi Pendidikan . secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi lembaga / institusi pendidikan :
Dapat dijadikan pedoman untuk Human Resource Development yaitu perencanaan pengembangan Staf Pengajar / Dosen dan Pemikiran Strategik bagi perguruan tinggi. Bagi PTN yang atau akan berotonomi, dapat dijadikan pedoman untuk perencanaan dan pengembangan dosen kaitannya dengan kualitas.
2. Bagi Individu atau Dosen :
Bagi Individu Dosen : dengan ditetapkan kriteria faktor-faktor lingkungan dan dosen menjadi salah satu “Quality Assurer” maka individu dosen mempunyai akuntabilitas terhadap kriteria itu dan menjaga motivasinya kearah tersebut.
3. Bagi Diri Sendiri :
Menambah dan meningkatkan : pengalaman sebagai peneliti, ilmu dan kualitas keputusan yang lebih baik.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya :
Diharapkan pengembangan penelitian dapat diteruskan oleh peneliti lain diantaranya : pemahaman dan pengaruh variabel–variabel lingkungan lainnya.



F. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Untuk lebih memperjelas dan mengarahkan pembahasan yang akan dilakukan, perlu dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Studi yang akan dilakukan adalah identifikasi faktor-faktor lingkungan yang dominan terhadap pengelolaan perguruan tinggi swasta, tetapi tidak membahas bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan.
2. Penelitian dibatasi hanya pada perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah Jawa Barat dan yang sudah mempunyai status, baik yang terakreditasi A, B, dan C.

Anggapan dasar yang diambil penulis adalah bahwa, semua perguruan tinggi swasta yang terakreditasi yang ada di Indonesia mempunyai karakteristik lingkungan yang sama, sehingga sampel perguruan tinggi swasta di wilayah Jawa Barat dapat mencerminkan keadaan perguruan tinggi swasta lainnya di seluruh Indonesia.

Perguruan tinggi adalah lembaga ilmiah, lembaga pendidikan tinggi, dan komunitas ilmiah sebagai "agent of change" yang mengemban misi sosial budaya, misi nasional dan modernisasi. Perguruan tinggi di Indonesia dewasa ini dihadapkan pada tantangan menjelang abad 21, yaitu (1) perubahan dan perkembangan IPTEK yang sangat cepat, (2) pembangunan nasional dan kompleksitas beberapa masalah kehidupan, dan (3) relevansi hasil pendidikan, (4) efeksifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Dari keempat masalah umum tersebut sebenarnya masalah pokok yang dihadapi dalam rangka Pembangunan Jangka Panjang Kedua dan era globalisasi ialah masa pengembangan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan yang sesuai. Karena itu perguruan tinggi harus segera dibenahi sedemikian

rupa sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, kemandirian dan kerjasama serta daya saing secara sehat.

Ditinjau dari sudut Administrasi Pendidikan berbagai masalah umum pendidikan tersebut kiranya bertumpu pada masalah kelemahan dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan, baik kesesuaian model manajemen yang digunakan maupun kemampuan dalam menerapkan secara profesional dan konsisten. Dalam hubungan ini GBHN telah mengisyaratkan bahwa pendidikan nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi dengan menggunakan manajemen pendidikan yang paling mutakhir.

Berdasarkan konsep-konsep dan pemikiran tersebut diatas, maka diantara upaya yang paling strategik ialah pengembangan organisasi dan strategi pengembangan serta pengembangan sumber daya manusianya. Karena dengan tercapainya pengembangan mutu sumber daya manusia diharapkan dapat mencapai kemampuan kemandirian dan kerjasama serta daya saing secara sehat dalam menghadapi tantangan, masalah dan peluang tahun 2020 mendatang. Salah satu upaya strategik untuk menyiapkan kualitas strategik pengembangan yang bermutu ialah melalui penyelenggaraan program-program pendidikan tinggi secara profesional.

Sehubungan dengan kerangka pemikiran tersebut diatas dan sesuai dengan berbagai pemikiran yang berkembang, dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

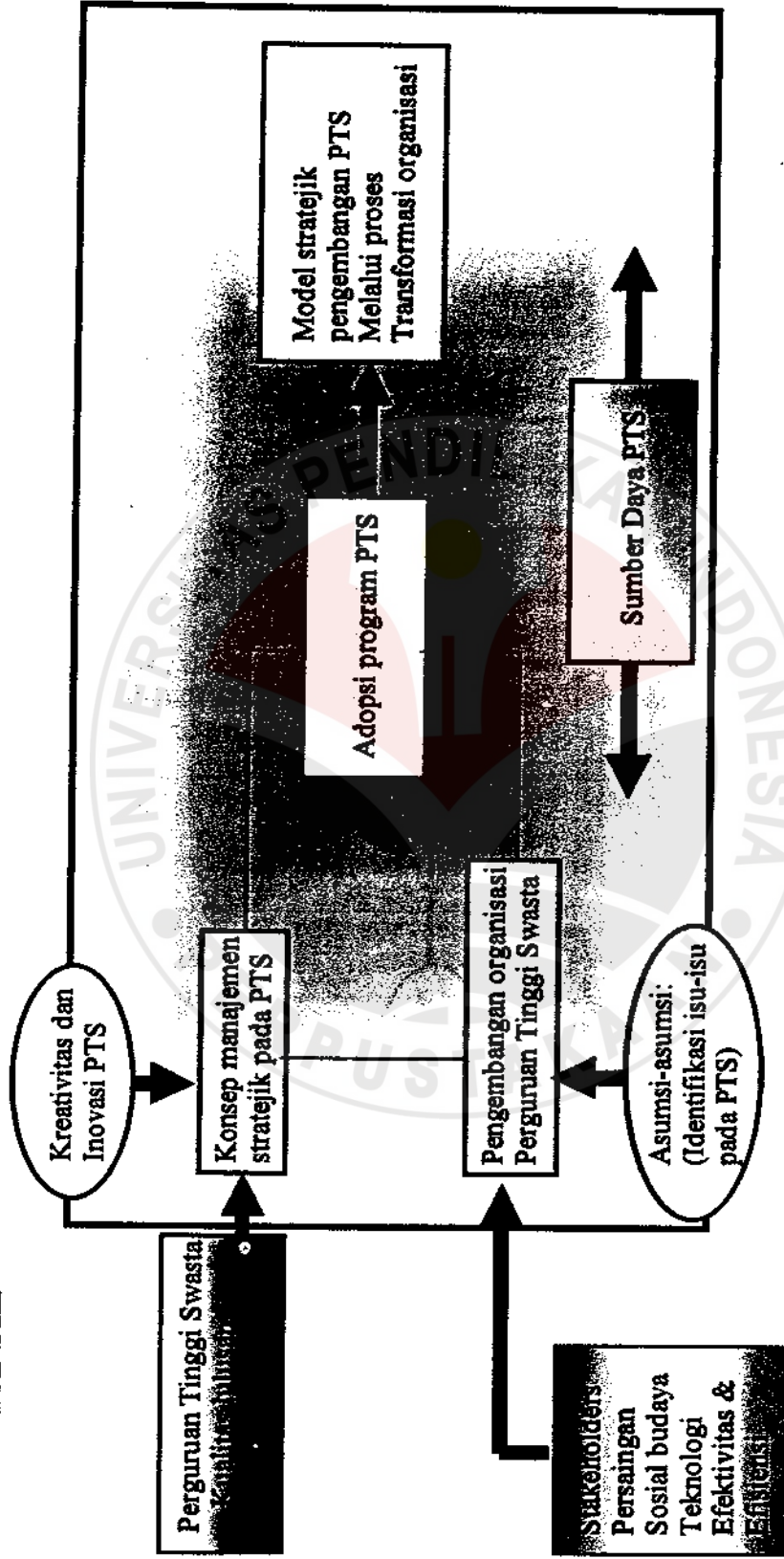
1. Jika terjadi perbedaan yang signifikan antara aspek sumber keuangan dengan strategi pengembangan PTS, maka perbedaan itu diduga terjadi oleh adanya unsur sumber daya manusia yang rendah.

2. Jika aspek bahan baku pada organisasi berpengaruh positif terhadap proses transformasi kualitas strategik pengembangan PTS, maka pengembangan organisasi yang terjadi pada PTS sesuai dengan urutan langkah-langkah dalam manajemen strategik yang dikembangkan oleh PTS.
3. Jika aspek saingan pada organisasi tidak sesuai dengan urutan langkah-langkah dalam manajemen strategik, maka strategi pengembangan PTS tidak akan mencerminkan adanya percepatan proses transformasi kualitas strategi pengembangan PTS.
4. Jika proses manajemen strategik pada PTS memperhatikan aspek lingkungan sosial budaya pada organisasi, maka secara signifikan akan berpengaruh pada kualitas manajemen PTS.
5. Jika aspek perundang-undangan pada organisasi PTS diimplementasikan sesuai dengan urutan pada manajemen strategik, maka strategi pengembangan PTS akan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas manajemen PTS.
6. Jika organisasi PTS memperhatikan proses aspek transformasi sumber daya manusia sesuai dengan urutan yang ada pada manajemen strategik, maka akan berpengaruh secara signifikan terhadap strategi pengembangan PTS.
7. Jika pengembangan organisasi PTS memperhatikan aspek dukungan sumber daya / teknologi secara signifikan maka strategi pengembangan telah sesuai dengan urutan pada manajemen strategik.

Kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada **gambar 1.4**.

LINGKUNGAN EKSTERNAL

ORGANISASI



Gambar 1.4. Kerangka Pemikiran Pemecahan Masalah Penelitian

Sumber: Elaborasi dari Richard L. Daft (2001). *Organization Theory And Design*, South-Western College Publishing. USA; Michael A. Hitt (1998). *Strategic Management : Competitives And Globalization*, West Publishing Company. USA; T.J. Carlin (1999). *Principles And Practices of Organizational Performance Excellence*, ASQ Quality Press, USA; Ralph G. Lewis & Douglas H. Smith (1994). *Total Quality In Higher Education*, St. Lucie Press. USA